



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Lembaga Pembentuk Peraturan di Bawah Presiden.....	19
B. Reformasi Kelembagaan	26
C. Landasan Teori	34
1. Teori Lembaga Negara.....	34
2. Teori Kewenangan	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45



C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	46
D. Jalannya Penelitian	50
E. Analisis Hasil	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Relevansi Lembaga Tunggal Pembentuk Peraturan di bawah Presiden terhadap Problematika Eksisting	51
1. Problematika Kelembagaan	55
2. Pembentukan Lembaga Tunggal menurut UU No. 15/2019.....	87
3. Catatan atas Pembentukan Lembaga Tunggal menurut UU 15/2019	103
B. Penataan Kelembagaan Pembentuk Peraturan di Bawah Presiden	115
1. Melanjutkan Usulan Pembentukan Lembaga Tunggal	116
a. Bentuk dan Nomenklatur	129
b. Struktur Kelembagaan.....	137
c. Kewenangan.....	140
2. Revitalisasi Lembaga Eksisting	151
a. Menyelesaikan Tumpang Tindih Kewenangan.....	155
b. Meredam Ego Sektoral.....	157
c. Perbaikan Aspek Pemantauan dan Peninjauan	159
d. Pemberian Otoritas Koordinasi terhadap Kemenko Polhukam	161
BAB V PENUTUP.....	168
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	171



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Peraturan di Indonesia per Agustus 2023	2
Tabel 2. Perbandingan Keaslian Penelitian	14
Tabel 3. Klasifikasi Tingkatan Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah	39
Tabel 4. Klasifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Legislasi	60
Tabel 5. Daftar Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	95
Tabel 6. Kewenangan Lembaga Tunggal Pembentuk Peraturan di Bawah Presiden berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019	102
Tabel 7. Perkembangan Pengaturan Kewenangan Pengundangan	114
Tabel 8. Perbandingan Nomenklatur Kementerian di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	135
Tabel 9. Klasifikasi Kewenangan Kementerian Peraturan Perundang-undangan	141
Tabel 10. Ruang Lingkup Kewenangan Kementerian Peraturan Perundang- undangan di bidang Pembentukan Regulasi	142
Tabel 11. Jalur Koordinasi Kementerian Peraturan Perundang-undangan dalam menjalankan fungsinya	148



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Perbandingan dan Irisan Jumlah RUU yang diusulkan Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 dan Prolegnas 2015-2019	61
Bagan 2. Alur Kelembagaan Penerbitan Peraturan Menteri berdasarkan Perpres No. 68 Tahun 2021	66
Bagan 3. Struktur Hubungan Penyelenggara Pemerintah	91
Bagan 4. Struktur Kementerian Peraturan Perundang-undangan	138